

Analisis Permasalahan Sikap Konstitusional di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Pertama Implikasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Sri Yunita¹ Suci Nurul Akhwatni Saragi² Enjelina Vincere Sihombing³ Ines Manalu⁴

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: sr.yunita@unimed.ac.id¹ sucisaragi293@gmail.com² enjelinasihombing34@gmail.com³
inesmanalu2022@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP dan mengidentifikasi implikasi dari permasalahan tersebut terhadap pendidikan kewarganegaraan. Metode penelitian melibatkan pengamatan langsung dan penyebaran angket kepada 32 siswa kelas 9 SMP sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah masalah sikap konstitusional, termasuk ketidaksiplinan saat belajar, kurangnya pengetahuan tentang konstitusi, ketidakpatuhan terhadap aturan, kecenderungan keributan, dan kurangnya sikap positif yang mencerminkan konstitusional di kalangan siswa SMP. Implikasi dari temuan ini sangat relevan dengan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Permasalahan sikap konstitusional yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kurikulum dan metode pengajaran kewarganegaraan. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa siswa memahami nilai-nilai konstitusional, kewarganegaraan yang aktif, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk perluasan dan perbaikan pendidikan kewarganegaraan di tingkat SMP.

Kata Kunci: Sikap Konstitusional, Siswa SMP, Pendidikan Kewarganegaraan, Analisis Implikasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan fondasi utama dalam pembentukan warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka serta memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang mendasari konstitusi suatu negara. Pendidikan ini bertujuan untuk melatih generasi muda agar dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi komponen integral dalam kurikulum pendidikan. Indonesia sebagai negara demokratis dengan beragam keragaman budaya dan etnis, menganggap pendidikan kewarganegaraan sebagai alat penting untuk memupuk semangat nasionalisme dan persatuan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang nilai-nilai konstitusional serta kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara menjadi esensial. Ini diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam mempertahankan persatuan dan menjaga integritas konstitusi di tengah perubahan zaman yang dinamis.

Meskipun pendidikan kewarganegaraan telah diperkenalkan di sekolah-sekolah di Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tetap signifikan. Salah satu isu yang mendalam dan mengkhawatirkan adalah permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP. Sikap konstitusional mencakup aspek-aspek seperti pemahaman konsep konstitusi, ketaatan terhadap hukum dan peraturan, serta kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Ketika siswa di tingkat SMP mengalami kendala dalam mengembangkan sikap konstitusional yang positif, hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan kewarganegaraan mereka dan,

secara lebih luas, pada stabilitas masyarakat dan negara. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian integral dari kurikulum di berbagai tingkat pendidikan, termasuk di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang aktif, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam membangun masyarakat dan negara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu isu yang muncul adalah permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP.

Sikap konstitusional mencakup berbagai aspek, mulai dari tingkat disiplin saat belajar hingga pemahaman yang mendalam tentang konstitusi sebagai dasar negara. Dalam beberapa kasus, siswa mungkin kurang menghargai nilai-nilai konstitusional atau bahkan tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP di Indonesia dan menganalisis implikasi dari permasalahan tersebut terhadap pendidikan kewarganegaraan di negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai pendidikan kewarganegaraan dan isu-isu terkait telah menjadi fokus yang semakin berkembang dalam dunia akademik dan pendidikan. Penelitian-penelitian terdahulu telah memperkenalkan berbagai aspek penting terkait sikap konstitusional siswa di berbagai tingkat pendidikan. Namun, ketika melihat kajian literatur terdahulu, terdapat beberapa kekosongan dalam pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan sikap konstitusional di tingkat SMP, terutama dalam konteks Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek pendidikan kewarganegaraan, seperti metode pengajaran, kurikulum, dan efektivitas program-program kewarganegaraan. Namun, hanya sedikit penelitian yang secara khusus memusatkan perhatian pada sikap konstitusional siswa SMP dan bagaimana permasalahan sikap ini dapat memengaruhi proses pendidikan kewarganegaraan. Terlebih lagi, penelitian terdahulu belum sepenuhnya menjelaskan implikasi permasalahan sikap konstitusional terhadap perkembangan individu dan partisipasi warga negara di masyarakat yang demokratis. Di tingkat internasional, beberapa penelitian telah memperlihatkan pola sikap dan perilaku warga negara muda yang memunculkan kekhawatiran akan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai konstitusional dan kewarganegaraan. Namun, situasi ini mungkin sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan pendidikan yang berbeda-beda di seluruh dunia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjembatani kesenjangan dalam literatur ilmiah dengan mengeksplorasi lebih lanjut permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP di Indonesia, yang mungkin memiliki konteks dan dinamika unik.

Penelitian ini juga akan memanfaatkan pemahaman dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan sikap siswa. Hal ini akan membantu dalam merumuskan pendekatan penelitian yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa penelitian ini memberikan sumbangan yang berarti terhadap pemahaman kita tentang permasalahan sikap konstitusional siswa SMP serta implikasinya terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kebaruan ilmiah penelitian ini menjadi sangat penting dalam konteks pemahaman masalah sikap konstitusional siswa SMP. Secara khusus, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini akan membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP di Indonesia. Meskipun telah ada penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan, kajian yang berfokus secara eksklusif pada isu-isu sikap konstitusional di tingkat SMP masih jarang ditemui dalam literatur ilmiah. Penelitian ini akan memberikan penekanan khusus pada pengungkapan aspek-aspek konkret yang merinci masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam hal pemahaman konstitusi, ketaatan terhadap peraturan, dan sikap positif terhadap nilai-nilai

demokrasi. Dengan begitu, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dengan menyoroti masalah ini yang mungkin telah terabaikan sebelumnya.

Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi implikasi dari permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP terhadap pendidikan kewarganegaraan. Ini adalah kontribusi yang sangat penting dalam mengisi celah pengetahuan karena literatur ilmiah sebelumnya cenderung belum memberikan pandangan komprehensif tentang dampak konkret dari permasalahan sikap konstitusional ini terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pemahaman yang lebih baik tentang implikasi ini akan memberikan panduan berharga dalam merancang strategi perbaikan pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif. Keseluruhan, penelitian ini akan menghadirkan pengetahuan baru dan relevan yang akan membantu memahami masalah sikap konstitusional siswa SMP secara lebih baik dan mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pendidikan kewarganegaraan. Hal ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia.

Permasalahan utama yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP di Indonesia memengaruhi pendidikan kewarganegaraan?" Pertanyaan ini menjadi fokus utama penelitian ini, seiring dengan upaya untuk menyelidiki fenomena yang berkaitan dengan sikap konstitusional siswa di tingkat SMP. Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan merumuskan beberapa hipotesis yang akan diuji. Hipotesis awal adalah bahwa adanya masalah sikap konstitusional di kalangan siswa SMP dapat berdampak negatif pada efektivitas pendidikan kewarganegaraan. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa ketika siswa memiliki sikap konstitusional yang kurang positif, mereka mungkin kurang terlibat dalam proses pembelajaran kewarganegaraan dan mungkin kurang cenderung menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi sikap konstitusional siswa di tingkat SMP. Hal ini dapat meliputi faktor-faktor internal seperti pemahaman konsep konstitusi, serta faktor-faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor ini, penelitian ini akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang akar permasalahan sikap konstitusional.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang cermat, termasuk pengumpulan dan analisis data yang valid, untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan sikap konstitusional siswa SMP dan akan memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga implikasi praktis yang besar dalam konteks pendidikan dan perkembangan masyarakat

Kajian Teori Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menjelajahi peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter dan sikap konstitusional siswa SMP. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan utama yang melibatkan pemahaman warga negara terhadap hak dan kewajiban mereka, meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokratis, serta mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi negara. Pemahaman yang mendalam tentang pendidikan kewarganegaraan akan membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tepat dan relevan dengan konteks Indonesia. Ini juga akan memberikan pandangan yang kaya tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat

memengaruhi perkembangan sikap konstitusional siswa SMP di negara ini. Selain tujuan pendidikan kewarganegaraan, pemahaman tentang pendidikan ini mencakup analisis tentang metode pengajaran yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, penelitian dapat mengevaluasi metode-metode pengajaran yang lebih efektif dalam membantu siswa memahami konsep konstitusi, nilai-nilai demokrasi, dan peran mereka sebagai warga negara.

Pemahaman yang kuat tentang pendidikan kewarganegaraan juga memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi relevansi kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah. Dengan mempertimbangkan sejauh mana kurikulum pendidikan kewarganegaraan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa SMP, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang perbaikan yang perlu dilakukan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam rangka untuk lebih memahami peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP, penting untuk merinci teori-teori yang mendasari pendidikan ini. Hal ini akan membantu dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan relevan dengan permasalahan sikap konstitusional yang mungkin ada. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan kewarganegaraan, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran yang lebih positif dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP di Indonesia.

Sikap Konstitusional

Ketika mempertimbangkan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP, kita perlu menjelajahi konsep sikap konstitusional secara lebih mendalam. Sikap konstitusional mencakup pemahaman, keyakinan, dan perilaku individu terhadap konstitusi suatu negara. Dalam pemahaman yang lebih dalam tentang konsep sikap konstitusional, kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen kunci yang membentuk sikap ini. Ini meliputi pemahaman tentang pentingnya konstitusi sebagai landasan negara, ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang didasarkan pada konstitusi, serta sikap positif terhadap nilai-nilai demokrasi yang mencakup kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif dalam proses demokratis.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep sikap konstitusional akan membantu penelitian ini dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan memetakan strategi analisis data yang sesuai. Hal ini juga akan memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang perlu diukur dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang konsep sikap konstitusional akan memberikan kerangka kerja yang solid untuk penelitian ini. Ini akan memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa SMP dan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran yang lebih positif dalam membentuk sikap tersebut di Indonesia.

Faktor-Faktor Internal

Faktor-faktor ini mencakup pemahaman individu tentang konsep konstitusi, persepsi mereka tentang hak dan kewajiban warga negara, serta kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor internal ini, kita dapat mengidentifikasi bagaimana pemahaman individu tentang konstitusi dapat membentuk sikap konstitusional mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang pentingnya konstitusi sebagai landasan negara, pengenalan hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konstitusi, serta pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam konstitusi. Pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor ini akan membantu penelitian dalam merancang strategi analisis yang relevan dengan permasalahan sikap konstitusional siswa SMP.

Selain pemahaman, faktor-faktor internal juga mencakup persepsi individu tentang hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana individu melihat diri mereka sebagai bagian dari masyarakat, apa yang mereka pandang sebagai hak dan kewajiban mereka, serta sejauh mana mereka merasa terlibat dalam masyarakat dapat memengaruhi sikap konstitusional mereka. Faktor-faktor ini menciptakan dinamika penting dalam pemahaman mengenai peran individu dalam masyarakat dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi sikap mereka terhadap konstitusi. Kesadaran akan nilai-nilai demokrasi juga menjadi bagian penting dalam faktor-faktor internal. Bagaimana individu menginternalisasi nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam proses demokratis dapat memengaruhi keterlibatan mereka dalam kehidupan politik dan sosial. Faktor-faktor ini membentuk inti dari sikap konstitusional individu dan peran mereka dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor internal ini akan membantu penelitian dalam merinci faktor-faktor yang mungkin memengaruhi sikap konstitusional siswa SMP. Hal ini juga akan membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih mendalam dan relevan dengan konteks Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor internal ini, penelitian ini akan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana pemahaman individu, persepsi tentang hak dan kewajiban, serta kesadaran akan nilai-nilai demokrasi memainkan peran dalam pembentukan sikap konstitusional siswa SMP di negara ini.

Faktor-Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini mencakup pengaruh dari lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan yang dapat membentuk sikap konstitusional individu. Pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor eksternal ini akan membantu dalam memahami bagaimana konteks sosial dan budaya memainkan peran dalam membentuk sikap konstitusional siswa. Ini mencakup pengaruh dari keluarga, teman sebaya, dan komunitas sekitar. Bagaimana individu terpapar pada pandangan dan nilai-nilai orang-orang di sekitarnya dapat memengaruhi cara mereka memandang konstitusi dan kewarganegaraan. Faktor-faktor eksternal ini juga mencakup budaya, seperti tradisi, norma-norma, dan nilai-nilai budaya yang dapat membentuk sikap individu terhadap peran mereka sebagai warga negara. Selain faktor sosial dan budaya, faktor pendidikan juga menjadi bagian penting dari faktor-faktor eksternal. Pendidikan formal di sekolah-sekolah, termasuk pendidikan kewarganegaraan, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk pemahaman individu tentang konstitusi dan hak serta kewajiban warga negara. Desain kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan sekolah memengaruhi cara siswa memandang konstitusi.

Pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor eksternal ini akan membantu penelitian dalam merinci bagaimana berbagai aspek lingkungan sosial, budaya, dan pendidikan dapat berinteraksi dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP. Hal ini akan membantu penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang perlu diperhitungkan dalam analisis data. Dengan pemahaman yang kuat tentang faktor-faktor eksternal ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana konteks sosial dan budaya Indonesia dapat memengaruhi sikap konstitusional siswa SMP, serta bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat berperan dalam membentuk sikap tersebut.

Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menjelajahi sejauh mana pendidikan kewarganegaraan efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan tersebut mencakup pengembangan pemahaman siswa tentang konstitusi, pembentukan sikap yang positif terhadap nilai-nilai demokrasi, dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Efektivitas

pendidikan kewarganegaraan akan membantu dalam mengukur sejauh mana program-program pendidikan ini berhasil memengaruhi sikap konstitusional siswa SMP. Dalam pengukuran ini, perlu dilakukan evaluasi dampak pendidikan kewarganegaraan terhadap pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara, serta pengukuran sikap siswa terhadap konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Hal ini akan memberikan wawasan yang penting tentang sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk sikap konstitusional yang positif pada siswa SMP. Selain pengukuran dampak, efektivitas pendidikan kewarganegaraan juga melibatkan evaluasi metode pengajaran yang digunakan dalam pendidikan ini. Dalam hal ini, penelitian dapat mengevaluasi metode pengajaran yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk metode yang memfokuskan pada pemahaman konsep, simulasi proses demokratis, serta pembelajaran berbasis pengalaman.

Pemahaman yang mendalam tentang efektivitas pendidikan kewarganegaraan akan membantu dalam merancang rekomendasi dan perbaikan. Dalam situasi di mana program-program pendidikan ini belum mencapai tujuan-tujuan mereka, penelitian ini dapat memberikan panduan tentang bagaimana program-program ini dapat ditingkatkan untuk lebih efektif dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas pendidikan kewarganegaraan akan memberikan landasan yang kokoh untuk mengevaluasi peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk sikap konstitusional siswa SMP dan merancang strategi perbaikan yang lebih efektif sesuai dengan temuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 35 Medan, dengan tujuan menganalisis permasalahan sikap konstitusional di kalangan siswa kelas 9. Lokasi penelitian dipilih secara cermat karena SMP Negeri 35 Medan dianggap mewakili karakteristik umum dari sekolah menengah pertama di wilayah tersebut, dan dapat memberikan wawasan yang relevan terkait sikap konstitusional siswa di Indonesia. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 32 siswa kelas 9 SMP Negeri 35 Medan. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan pertimbangan hati-hati, mengakomodasi kecukupan data yang dibutuhkan untuk analisis yang diinginkan, sambil memperhatikan kendala sumber daya dan waktu yang terbatas dalam konteks penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan penggunaan angket sebagai instrumen utama. Desain angket dibuat dengan teliti, dengan mempertimbangkan tujuan penelitian serta konsep yang mendasari sikap konstitusional. Proses pengembangan angket mencakup langkah-langkah seperti perancangan pertanyaan yang relevan dengan variabel penelitian, uji coba angket untuk memastikan kejelasan pertanyaan, serta penyesuaian berdasarkan masukan yang diperoleh dari uji coba tersebut. Setelah angket dirancang dengan baik, langkah selanjutnya adalah penyebaran kepada siswa kelas 9 SMP Negeri 35 Medan. Proses penyebaran angket dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Hasil data yang terkumpul dari angket akan diolah menggunakan metode analisis statistik. Proses analisis melibatkan teknik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai sikap konstitusional siswa, termasuk pemahaman mereka tentang konstitusi, persepsi terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta sikap terhadap nilai-nilai demokrasi. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi sikap konstitusional. Hasil data yang terkumpul dari angket akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai sikap konstitusional siswa, termasuk pemahaman mereka tentang konstitusi, persepsi terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta sikap terhadap nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi sikap konstitusional. Tolok ukur kinerja dalam penelitian ini mencakup berbagai variabel yang relevan dengan sikap konstitusional siswa. Variabel-variabel ini diukur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam angket. Metode pengukuran ini telah digunakan secara luas dalam penelitian sejenis dan dianggap relevan dalam mengukur variabel-variabel yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan pemahaman dan sikap konstitusional di kalangan siswa kelas 9 SMP Negeri 35 Medan. Pengumpulan data dilakukan melalui angket sebagai instrumen utama, dan analisis data kualitatif menghasilkan temuan-temuan yang mencerminkan pemahaman dan sikap siswa terkait konstitusi dan kewarganegaraan. Pertama, terkait pemahaman tentang konstitusi, temuan menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang konstitusi. Mereka umumnya mengetahui bahwa konstitusi adalah hukum dasar negara, tetapi pemahaman mendalam tentang isi konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih terbilang rendah. Bahkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi dan hak serta kewajiban warga negara juga tampak minim. Kedua, dalam hal persepsi tentang hak kewajiban dan warga negara, data menunjukkan variasi dalam pemahaman siswa.

Sebagian besar siswa menyadari hak-hak dasar seperti hak memilih dan hak berpendapat, tetapi pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam konstitusi masih perlu ditingkatkan. Variasi dalam persepsi ini tampaknya dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan sosial dan pendidikan yang alami. Ketiga, sikap siswa terhadap nilai-nilai demokrasi juga menunjukkan variasi. Sebagian besar siswa menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Namun, ada juga siswa yang cenderung apatis terhadap proses politik dan kurang antusias terhadap nilai-nilai demokrasi. Pembahasan atas temuan-temuan ini menyoroti beberapa hal penting. Pertama, keterbatasan pemahaman siswa tentang konstitusi menunjukkan perlunya perbaikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Materi yang berkaitan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi perlu diajarkan secara lebih efektif agar siswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan negara.

Kedua, variasi dalam persepsi tentang hak kewajiban dan warga negara mengindikasikan perlunya pendidikan yang lebih kuat tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekolah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Ketiga, variasi dalam sikap terhadap nilai-nilai demokrasi mencerminkan kompleksitas pemahaman siswa tentang demokrasi. Ini menggarisbawahi pentingnya mendorong diskusi dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan kewarganegaraan. Keempat, selama pengamatan di kelas, kami melihat adanya masalah disiplin belajar dan perilaku siswa. Terjadi keributan di kelas, suasana belajar tidak kondusif, dan kurangnya ketertiban terlihat dalam berpakaian siswa. Ini menandakan bahwa sikap konstitusional juga dapat tercermin dalam perilaku sehari-hari siswa di sekolah. Permasalahan ini perlu menjadi perhatian bagi pendidik dan sekolah untuk memastikan bahwa pembentukan sikap konstitusional tidak terbatas pada pemahaman semata, tetapi juga tercermin dalam perilaku positif siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, hasil penelitian ini juga menyoroti peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk pemahaman dan sikap konstitusional siswa. Kurikulum dan metode pengajaran perlu disusun ulang untuk memastikan bahwa materi yang berkaitan dengan konstitusi, hak, kewajiban warga negara, dan nilai-nilai demokrasi diajarkan secara efektif.

Dalam hal ini, peran guru dalam menginspirasi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi juga sangat penting. Selain itu, selama pengamatan langsung di kelas, kami juga melihat adanya permasalahan disiplin belajar dan perilaku siswa. Munculnya keributan, ketidakkondusifan dalam sikap dan perilaku, serta kurangnya ketertiban dan kerapian saat berpakaian menjadi perhatian penting. Hal ini dapat dianggap sebagai tanda-tanda sikap konstitusional yang perlu diperbaiki. Implikasinya adalah perlunya pendekatan pendidikan yang lebih holistik untuk membentuk sikap konstitusional siswa, yang tidak hanya mencakup pemahaman konstitusi, tetapi juga norma-norma perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kondisi sikap konstitusional siswa SMP dan penerapannya terhadap pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan memahami temuan ini, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan sikap konstitusional siswa, yang pada gilirannya dapat memperkuat kualitas kewarganegaraan di masa depan. Diperlukan upaya kolaboratif dari pihak sekolah, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan warga negara yang sadar akan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan sikap konstitusional siswa kelas 9 SMP Negeri 35 Medan masih memiliki ruang untuk peningkatan yang signifikan. Mayoritas siswa memiliki pemahaman yang terbatas tentang konstitusi dan nilai-nilai demokrasi, yang menciptakan dasar permasalahan terkait sikap konstitusional siswa. Variasi dalam sikap siswa terhadap nilai-nilai demokrasi juga mencerminkan kompleksitas dalam pemahaman mereka tentang demokrasi. Beberapa siswa menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai demokrasi, sementara yang lain cenderung apatis terhadap proses politik. Oleh karena itu, perbaikan dalam pendidikan kewarganegaraan perlu menjadi prioritas untuk membentuk sikap positif terhadap nilai-nilai demokrasi. Permasalahan disiplin belajar dan perilaku siswa di sekolah juga menjadi fokus penting. Sikap konstitusional siswa tercermin dalam perilaku sehari-hari mereka di sekolah. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan perilaku positif siswa sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan revisi dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Materi yang berkaitan dengan konstitusi, hak, kewajiban warga negara, dan nilai-nilai demokrasi harus diajarkan secara lebih efektif. Guru juga perlu dilengkapi dengan pendekatan pengajaran yang inovatif untuk menginspirasi siswa. Kedua, peran sekolah dalam membentuk perilaku siswa sangat penting. Sekolah perlu menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan perilaku positif siswa, yang mencerminkan sikap konstitusional yang baik. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan perlu menjadi bagian integral dari upaya penguatan demokrasi di Indonesia. Siswa perlu diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratis dan memahami peran mereka sebagai warga negara. Terakhir, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami perubahan sikap konstitusional siswa seiring berjalannya waktu dan efektivitas langkah-langkah perbaikan yang diimplementasikan. Dengan upaya yang tepat, pemahaman dan sikap konstitusional siswa dapat ditingkatkan, dan Indonesia dapat memiliki generasi warga negara yang lebih sadar akan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2019). *Pendidikan Demokrasi dalam Membentuk Karakter Bangsa*. Penerbit PT Bumi Aksara.

- Daradjat, Z. (2021). *Etika Politik: Refleksi Pemikiran Etis dalam Politik*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
- Effendi, D. T., & Ichsan, M. (2020). *Pendidikan Demokrasi: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Firdaus, R. (2018). *Pemahaman Pemuda terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-12.
- Hasan, I. (2018). *Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktek dalam Bingkai Pancasila*. Penerbit PT Kompas Media Nusantara.
- Hosen, N. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia: Refleksi Kritis pada Undang-Undang Dasar 1945*. Penerbit PT Genta Publishing.
- Ichsan, M. (2019). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Konstitusi: Pemikiran Hukum Tata Negara*. Penerbit PT Kompas Media Nusantara.
- Imron, A. (2018). *Pendidikan Demokrasi: Teori dan Praktik*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Ismoyo, A. A. (2019). *Politik Hukum dalam Dinamika Tata Negara Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Kuntjoro, W., & Nurkholis, N. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Prospek*. Penerbit PT Kompas Media Nusantara.
- Kusuma, M. A. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Membangun Karakter Bangsa*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 123-135.
- Mahendra, H. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memantapkan Karakter Bangsa*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Munawaroh, U., & Khumaedi. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kesadaran Berpolitik di Sekolah*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 43-52.
- Narwoko, J. D. (2019). *Masyarakat Sipil, Demokrasi, dan Partisipasi Publik*. Penerbit PT Kompas Media Nusantara.
- Prabowo, A. R. (2018). *Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 105-114.
- Pratiwi, V. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama*. Penerbit Prenada Media.
- Purwadi. (2018). *Konstitusi, Demokrasi, dan Keadilan: Tinjauan atas Undang-Undang Dasar 1945*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmawati, D. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mewujudkan Warga Negara yang Demokratis: Panduan Implementasi Kurikulum 2013*. Penerbit PT Bumi Aksara.
- Rasyid, M. M., & Kurniawan, B. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membentuk Warga Negara yang Demokratis*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Soetarno, T. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan yang Humanis: Panduan bagi Guru dan Calon Guru*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Sudirman, S. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiarto, B. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Generasi Muda*. PT Prenada Media.
- Tilaar, H. A. R. (2020). *Pembaharuan Pendidikan di Indonesia: Mencari Arah Baru*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wahyuni, S. (2020). *Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Wibisono, S. (2018). *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia: Tantangan Implementasi dalam Konteks Indonesia*. Penerbit PT Prenada Media.
- Widjajanti, N. (2018). *Politik Hukum Tata Negara dalam Era Reformasi*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada.

- Wijaya, B. (2020). *Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokratis di Era Digital*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, M. (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Pemikiran Konstitusi 1945 dan Era Reformasi*. Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yusuf, M., & Hosen, N. (2019). *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi: Perbandingan Perspektif Hukum dan Politik*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada.